

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF SEBAGAI
SUATU STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENERAPAN OTONOMI DAERAH DI KOTA MATARAM**

SYAUMUDINSYAH

Dosen Tetap Prog. Studi Ilmu Administrasi Negara STIA Mataram

Email : syaumudinsyah46@yahoo.com

ABSTRACT

Regional development is an integral part of national development, in addition to the regional development as well as the growth and development towards improving the welfare of the nation in the dynamics of life. With the enactment of Law No. 22 Year 1999 on Regional Government in which regulate the implementation of regional autonomy, which gives broad authority, tangible and accountable to local professionally realized with a setting, sharing and utilization of national resources and the financial balance center and the area after the principles of democracy, participation, equity, justice and the potential and diversity of the area, which is carried out within the framework of the Unitary State of Indonesia republic.

Mataram city as one of the autonomous regions in planning and implementing development that can be used as one factor in measuring the success of development is to involve the community, or better known as community empowerment, the community is expected to maintain and maintain both the sustainability of the results of such development.

The purpose of this study was to determine and menganalisis factors that play a role in supporting the success of participatory development planning in Mataram, understand government policies Kota Mataram in determining priorities participatory development planning in Mataram, recommending strategies participatory development planning yang sesuai needs and the condition of the city of Mataram.

The research method is to identify factors that play a role in supporting the success of participatory development planning, government policies Mataram in determining priorities participatory development planning. Data and information obtained were processed and analyzed by using multiple regression analysis techniques.

The results of analysis the percentage who support successful development planning partisipatif in the city of Mataram are factors Model Man (level of education, health, the relationship between sesame) is 83.33%, social model (kerjasama between sesame, trust between sesame, adherence to norms, concern among sesame, involvement in activities of social organizations) amounted to 92, 58%, the public perception of the process of empowerment is at 90.58%, and the public perception of the ability of actors empowerment amounted to 95.78%.

In this study we can conclude that the dominant factor in supporting the success of participatory development planning is the public perception of the ability of perpetrators of empowerment that is equal to 95.78%.

As for suggestions relating to the above conclusion, namely Considering "label" community empowerment is used by many programs / projects, there needs to be a policy umbrella so as not to confuse its implementation in the community, for the components of mentoring and consultancy necessary to distinguish between the need for consultants at the central and area, given the provision of assistance and consultancy in the area will open up employment opportunities for local scholar / local, need to be made location mapping programs / projects empowerment so as not to overlap and to ensure equity activities in the area.

Keywords : Planning, Participatory Development, Strategy, Empowerment Society, Autonomy.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah, antar kota kota dan desa, antar sector dan daerah yang dilaksanakan oleh berbagai Departemen/Lembaga maupun daerah merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang bertumpu pada unsure Trilogi Pembangunan yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara efisien dan efektif, maka pelaksanaan pembangunan daerah disesuaikan dengan potensi, kondisi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pembangunan daerah agar dilaksanakan secara serasi dan terpadu diberbagai sektor pembangunan menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah.

Dalam rangka menyusun rencana pembangunan agar tercapai hasil yang optimal, maka penyusunan rencana pembangunan idealnya merupakan hasil perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning), melalui tahap-tahap penyusunan di semua tingkatan pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai ke tingkat nasional dan sebaliknya dari pusat ke daerah dan desa.

Kota mataram sebagai salah satu daerah otonomi dalam melaksanakan pembangunan daerah menerapkan salah satu pola perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipatif masyarakat. Pola pembangunan ini merupakan salah satu realisasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Di mana dalam rangka itu mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan titik tekannya adalah masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah bertindak sebagai fasilitator (memberikan bimbingan dan kemudahan) yang mendorong dan menciptakan masyarakat dalam menyelesaikan masalah dengan potensi yang dimilikinya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, Kota Mataram dalam era otonomi daerah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam rangka mengkaji perencanaan pembangunan partisipatif sebagai pemberdayaan masyarakat di Kota Mataram, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a) Faktor – faktor apa saja yang berperan dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan partisipatif ?
- b) Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam menentukan prioritas perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Mataram ?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini di batasi mengenai perencanaan pembangunan partisipatif sebagai suatu strategi pemberdayaan masyarakat di Kota Mataram dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dilakukan agar memudahkan dan memberikan fokus perhatian terhadap penentuan prioritas strategi perencanaan pembangunan partisipatif.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.2. Kerangka Teoritis

Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagai suatu Strategi(Syaumudinsyah)

2.2.1. Perencanaan Pembangunan

Paradigma pembangunan nasional Indonesia dewasa ini sudah semakin berorientasi pada upaya penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tujuan akhir pembangunan nasional adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana untuk mencapai tujuan pembangunan harus dilakukan melalui tahap perencanaan pembangunan yang baik sehingga hasil pembangunan benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1995), ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha mencapai tujuan-tujuan pembangunan biasanya terkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong (agent of development).

Lebih lanjut menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1995), perencanaan pembangunan bukan saja dilakukan hanya pada tahap kegiatan penyusunan rencana saja, akan tetapi merupakan suatu proses kegiatan usaha yang terus menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

Bachrawi Sanusi (2000), Walaupun begitu banyaknya ragam dari tehnik perencanaan dan rencana pembangunan, adanya cirri-ciri dasar tertentu dari perencanaan yang komperhensif penting bagi negara-negara berkembang.

Menurut Killick dalam Bachrawi Sanusi (2000), ada enam cirri dari proses perencanaan, sebagi berikut :

- 1). Secara pandangan politik dan tujuan-tujuan pemerintah, dalam perencanaan tersebut diusahakan untuk menetapkan tujuan-tujuan kebijaksanaan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi pada waktu mendatang
- 2). Rencana pembangunan harus mengandung susunan suatu strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan – tujuan tersebut, yang biasanya dijabarkan menjadi target yang lebih khusus
- 3). Rencana tersebut harus pula menyajikan suatu koordinasi terpusat serta konsisten terhadap prinsip-prinsip dan kebijaksanaan, memilih tindakan-tindakan yang optimal dalam melaksanakan strategi serta mencapai targetnya sehingga dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengarahkan keputusan dalam tindakan – tindakan sehari-hari.
- 4). Perencanaan tersebut mencakup seluruh perekonomian (catatan: komperhensif sebagai kebalikan dari perencanaan colonial atau sektor pemerintah).
- 5). Untuk mencapainya secara optimal konsisten, maka rencana yang komperhensif lebih banyak menggunakan model ekonomi makro yang dinormalkan, dan kegiatan proyek ini digunakan untuk melihat keragaman ekonomi pada waktu mendatang
- 6). Rencana pembangunan umumnya mencakup masa/periode misalnya lima tahun, dan secara fisik ditujukan sebagai suatu naskah perencanaan jangka menengah yang mungkin saja berkaitan dengan perspektif yakni rencana jangka panjang yang dilengkapi dengan rencana – rencana tahunan.

2.2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suhendra (2006), pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif, dengan keterlibatan semua potensi.

Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat (Suhendra ; 2006) dapat diartikan bahwa masyarakat di beri kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi,

Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagai suatu Strategi(Syaumudinsyah)

pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya.

Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternative pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif.

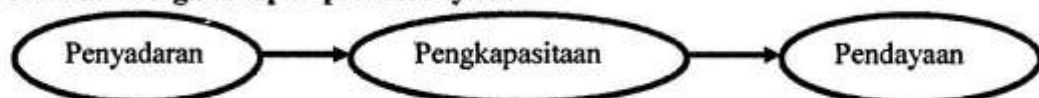
Tujuan utama dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara proposional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya. (Sinambela ; 2006)

Peningkatan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan dan pelaksanaan demokrasi.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya gerakan terus menerus untuk menghasilkan suatu kemandirian (self propelled development). Pemberdayaan harus berawal dari kemauan politik (political will), para penguasa seperti yang dikemukakan oleh Reonald D. White (dalam suhendra ; 2006).

Menurut Randy dan Riant Nugroho (2007), pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi”, bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitaan, dan pendayaan.

Gambar 1. Tiga tahapan pemberdayaan



Sumber : Randy R.W & Riant Nugroho W, Tiga Tahapan Pemberdayaan

2.2.3. Konsep Pemberdayaan

Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan”, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Memahami konsep *empowerment* secara tepat harus memahami latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep *empowerment* mulai nampak sekitar dekade 70-an dan terus berkembang hingga 1990-an. (Pranarka & Vidhyandika,1996)

Pranarka dan Vidhyandika (Hikmat, 2004) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran *post-modernisme*. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Priyono Dan Pranarka (1996) membagi dua fase penting untuk memahami akar konsep pemberdayaan, yakni: *pertama*, lahirnya Eropa modern sebagai akibat dari dan reaksi terhadap alam pemikiran, tata masyarakat dan tata budaya Abad Pertengahan Eropa yang ditandai dengan gerakan pemikiran baru yang dikenal sebagai *Aufklarung* atau *Enlightenment*, dan *kedua*, lahirnya aliran-aliran pemikiran eksistensialisme, fenomenologi, personalisme yang lebih dekat dengan gelombang Neo-Marxisme, Freudianisme, strukturalisme dan sebagainya.

Perlu upaya mengakulturasikan konsep pemberdayaan tersebut sesuai dengan alam pikiran dan kebudayaan Indonesia. Perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat diawali dengan proses penghilangan harkat dan martabat manusia (dehumanisasi). Proses penghilangan harkat dan martabat manusia ini salah satunya banyak dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi dan

teknologi yang nantinya dipakai sebagai basis dasar dari kekuasaan (*power*).

Power adalah kemampuan untuk mendapatkan atau mewujudkan tujuan. Bachrach dan Baratz (1970) membuktikan bahwa *power* adalah konsep rasional (*rational concept*). Dalam pandangan mereka, *power* dilakukan yang dilakukan A hanya dilakukan dalam hubungan individu atau kelompok B untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang diberikan oleh B yang rela melakukan pilihan atas sanksi yang ada atau akan kehilangan sesuatu yang lebih tinggi (kekuasaan atau uang). Sistem alternatif memerlukan proses "*empowerment of the powerless*." Namun *empowerment* hanya akan mempunyai arti kalau proses pemberdayaan menjadi bagian dan fungsi dari kebudayaan, yaitu aktualisasi dan koaktualisasi eksistensi manusia dan bukan sebaliknya menjadi hal yang destruktif bagi proses aktualisasi dan ko-aktualisasi eksistensi manusia (Priyono Dan Pranarka, 1996).

Robinson (1994) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Ife (1995) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata "*empowerment*," yang berarti memberi daya, memberi "*power*" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya. Segala potensi yang dimiliki oleh pihak yang kurang berdaya itu ditumbuhkan, diaktifkan, dikembangkan sehingga mereka memiliki kekuasaan untuk membangun dirinya. Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat menekankan kemandirian masyarakat itu sebagai suatu sistem yang mampu mengorganisir dirinya. Payne (1997) menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Paul (1987) menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Rappaport (1987) mengatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik dan hak-haknya. MacArdle (1989) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan itu. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu pelimpahan atau pemberian kekuatan (*power*) yang akan menghasilkan hierarki kekuatan dan ketiadaan kekuatan, seperti yang dikemukakan Simon (1990) dalam tulisannya tentang *Rethinking Empowerment*. Simon menjelaskan bahwa pemberdayaan suatu aktivitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subyek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self-determination*). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat prosedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan sistem yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik.

Sulistiyan (2004) menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.2.4. Proses Pemberdayaan

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa "proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog".

Kartasasmita (1995) menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: *Pertama*: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Kaitannya dengan indikator masyarakat berdaya, Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: (1) mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), (2) mampu mengarahkan dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan untuk berunding, (4) memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan (5) bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.

Adi (2003) menyatakan bahwa meskipun proses pemberdayaan suatu masyarakat merupakan suatu proses yang berkesinambungan, namun dalam implementasinya tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya. Tak jarang ada kelompok-kelompok dalam komunitas yang melakukan penolakan terhadap "pembaharuan" ataupun inovasi yang muncul. Watson (Adi, 2003) menyatakan beberapa kendala (hambatan) dalam pembangunan masyarakat, baik yang berasal dari kepribadian individu maupun berasal dari sistem sosial:

a. Berasal dari Kepribadian Individu; kestabilan (*Homeostatis*), kebiasaan (*Habit*),

seleksi Ingatan dan Persepsi (*Selective Perception and Retention*), ketergantungan (*Depedence*), *Super-ego*, yang terlalu kuat, cenderung membuat seseorang tidak mau menerima pembaharuan, dan rasa tak percaya diri (*self-Distrust*)

- b. Berasal dari Sistem Sosial; kesepakatan terhadap norma tertentu (*Conformity to Norms*), yang "mengikat" sebagian anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu, kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*Systemic and Cultural Coherence*), kelompok kepentingan (*vested Interest*), hal yang bersifat sakral (*The Sacrosanct*), dan penolakan terhadap "Orang Luar" (*Rejection of Outsiders*)

2.2.5. Tujuan dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggungjawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan membuka kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan program pembangunan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Sebagaimana dikemukakan oleh Montagu & Matson (Suprijatna, 2000) yang mengusulkan konsep *The Good Community and Competency* yang meliputi sembilan konsep komunitas yang baik dan empat komponen kompetensi masyarakat. *The Good Community and Competency* itu adalah; (1) setiap anggota masyarakat berinteraksi satu sama lain berdasarkan hubungan pribadi atau kelompok; (2) komunitas memiliki kebebasan atau otonomi, yaitu memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepen-tingannya sendiri secara mandiri dan bertanggung jawab; (3) memiliki vialibilitas yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri; (4) distribusi kekuasaan secara adil dan merata sehingga setiap orang mempunyai berkesempatan dan bebas memiliki serta menyatakan kehendaknya; (5) kesempatan setiap anggota masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama; (6) komunitas memberi makna kepada anggota; (7) adanya heterogenitas/beda pendapat; (8) pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin kepada yang berkepentingan; dan (9) adanya konflik dan manajemen konflik.

Pembentukan masyarakat yang memiliki kemampuan yang memadai untuk memikirkan dan menentukan solusi yang terbaik dalam pembangunan tentunya tidak selamanya harus dibimbing, diarahkan dan difasilitasi. Berkaitan dengan hal ini, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak jatuh lagi. Berdasarkan pendapat Sumodiningrat berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri.

Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap, yaitu: (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli, sehingga yang bersangkutan merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri, (2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan berpikir atau pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar dapat mengambil peran di dalam pembangunan, dan (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuk inisiatif, kreatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian (Sulistiyani, 2004).

Serangkaian tahapan yang ditempuh melalui pemberdayaan tersebut dapat diamati pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan pemberdayaan *knowledge, attitudes, practice* dengan pendekatan aspek afektif, kognitif, psikomotorik dan konatif

Tahapan Afektif	Tahapan Kognitif	Tahapan Psikomotorik	Tahapan Konatif
Belum merasa sadar & peduli	Belum memiliki Wawasan pengetahuan	Belum memiliki ketrampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
Tumbuh rasa kesadaran & kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai ketrampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
Memupuk semangat kesadaran & kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan ketrampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat yang lebih tinggi	Memperkaya variasi ketrampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sumber: Sulistiyani (2004). *Kemampuan Pelaku Pemberdayaan*

Pada era reformasi dan desentralisasi saat ini tuntutan terhadap pelaku pemberdayaan yang memiliki kemampuan yang memadai semakin menguat. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperkaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain program pemberdayaan. Lantas muncul pertanyaan, kemampuan seperti apa yang harus dimiliki oleh pelaku pemberdayaan?. Tjokrowinoto (2001) me-nawarkan lima bentuk kemampuan yang dianggapnya sangat relevan dengan kualitas pelaku pemberdayaan, yakni: (1) kemampuan untuk melihat peluang-peluang yang ada, (2) kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah yang dianggap prioritas dengan mengacu pada visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, (3) kemampuan mengidentifikasi sub-jeK-subjek yang mempunyai potensi memberikan input dan sumber bagi proses pembangunan, (4) kemampuan menjual inovasi dan memperluas wilayah penerimaan program-program yang

Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagai suatu Strategi(Syaumudinsyah)

diperuntukkan bagi kaum miskin; dan (5) kemampuan memainkan peranan sebagai fasilitator atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh berkembang dengan kekuatan sendiri.

Keterpaduan kelima kemampuan pelaku pemberdayaan tersebut patut dijadikan rujukan atau pedoman oleh seluruh unsur *stakeholders*, terutama yang mempunyai tanggung jawab langsung terhadap keberhasilan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Namun dukungan kelima kemampuan ini pun tidak akan berarti kalau tidak disertai dengan sikap perilaku adil dan komitmen yang kuat. Jamasy (2004) menambahkan bahwa ada tujuh syarat kemampuan umum yang harus dimiliki pelaku pemberdayaan dan kesemuanya harus terefleksi dalam kegiatan aksi program, yakni kemampuan untuk: (1) memper-tahankan keadilan, (2) mempertahankan kejujuran, (3) melakukan *problem solving*, (4) mempertahankan misi, (5) memfasilitasi, (6) menjual inovasi, dan (7) fasilitasi yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sendiri.

Keberhasilan pelaku pemberdayaan dalam memfasilitasi proses pemberdayaan juga dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat. Fasilitator harus trampil mengintegrasikan tiga hal penting yakni: optimalisasi fasilitasi, waktu yang disediakan, dan optimalisasi partisipasi masyarakat. Masyarakat pada saat menjelang batas waktu harus diberi kesempatan agar siap melanjutkan program pembangunan secara mandiri. Sebaliknya, fasilitator harus mulai mengurangi campur tangan secara perlahan. Tanamkan kepercayaan pada masyarakat yang selanjutnya akan mengelola program.

Berkaitan dengan jangka waktu keterlibatan fasilitator (pelaku pemberdayaan) dalam mengawal proses pemberdayaan terhadap warga masyarakat, Sumodiningrat (2000) menjelaskan bahwa, pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh tetap dipantau agar tidak jatuh lagi. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran.

Berkaitan dengan tugas pelaku pemberdayaan sebagai fasilitator oleh Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) memberikan kerangka acuan mengenai tugas sebagai berikut; (1) mendefinisikan siapa yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, (2) mendefinisikan tujuan keterlibatan, (3) mendorong komunikasi dan relasi, serta menghargai pengalaman dan perbedaan-perbedaan, (4) memfasilitasi keterikatan dan kualitas sinergi sebuah sistem: menemukan kesamaan dan perbedaan, (5) memfasilitasi pendidikan membangun pengetahuan dan keterampilan, (6) memberikan contoh dan memfasilitasi pemecahan masalah bersama mendorong kegiatan kolektif, (7) mengidentifikasi masalah-masalah prioritas yang akan dipecahkan bersama dan memfasilitasi penetapan tujuan, (8) merancang solusi-solusi alternative, (9) mendorong pelaksanaan tugas, dan (10) memecahkan konflik/masalah.

3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

- a) Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang berperan dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Mataram
- b) Mengetahui kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam menentukan skala prioritas pembangunan partisipatif di Kota Mataram.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagai suatu Strategi(Syaumudinsyah)

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada :

- a) Kota Mataram sebagai bahan informasi dan masukan dalam menentukan model perencanaan pembangunan partisipatif yang sesuai dengan kondisi Kota Mataram
- b) Untuk memberikan kontribusi dalam memecahkan masalah terhadap hambatan-hambatan yang ditemui dalam perencanaan pembangunan partisipatif.

4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode, sebagai berikut :

4.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Pemerintah Kota dengan alamat jln. Selaparang, Mataram - Nusa Tenggara Barat

4.2. Jenis dan Sumber Data

4.1.1. Jenis Data

Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.

4.2.2. Sumber Data

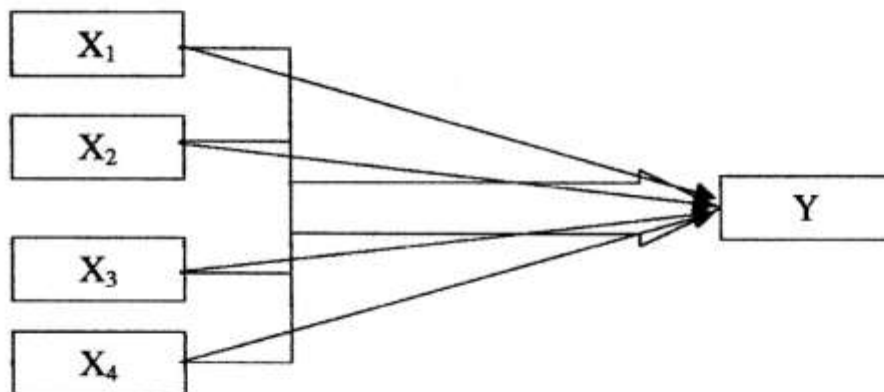
- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui observasi, wawancara
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka seperti buku, referensi, laporan serta acuan lainnya yang relevan.

4.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui wawancara terbuka dan pengisian kuisioner yang dibuat secara khusus untuk menganalisis. Pengumpulan data sekunder sebagai penunjang penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai buku, referensi, laporan serta acuan-acuan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4.4. Metode Analisis Data

Gambar 2. Model / Paradigma Penelitian



Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel yang diteliti dibedakan kedalam dua kategori, yaitu:

- (1). variabel bebas atau *independent variable* (variabel berpengaruh) adalah Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari tiga sub-variabel yang selanjutnya disebut sebagai variabel-variabel bebas, masing-masing : Model Manusia (Human Capital) sebagai variabel bebas satu (X1); Model Sosial (Human Sosial sebagai variabel bebas dua (X2); Persepsi masyarakat terhadap terhadap proses pemberdayaan sebagai variabel bebas tiga (X3) dan Persepsi masyarakat terhadap kemampuan

pelaku pemberdayaan sebagai variabel bebas empat (X4).

- (2). Hasil pemberdayaan masyarakat yang diberi simbol Y.

Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Model manusia (Human Kapital) sebagai variabel bebas satu (X1) dikonsepsikan sebagai tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat keeratan, tingkat hubungan antar sesama
2. Model Sosial (Social Model) sebagai variabel bebas dua (X2) dimaksudkan adalah kerjasama antar sesame, kepercayaan antar sesame, kepatuhan terhadap norma, kepedulian antar sesame, keterlibatan dalam aktivitas oerganisasional dan pembangunan
3. Persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan sebagai variabel bebas tiga (X3) diukur melalui beberapa indikator, antara lain : 1) perencanaan; 2) pengorganisasian; 3) pelaksanaan; 4) evaluasi.
4. Persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan sebagai variabel bebas empat (X4) didefinisikan sebagai fasilitator (pemerintah, lembaga-lembaga swadaya, komponen yang terlibat dalam proses pemberdayaan)
5. Hasil pemberdayaan sebagai variabel tak bebas (Y) dimaksudkan adalah hasil pemberdayaan masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data survai diketahui bahwa jumlah Jumlah Kecamatan di Kota Mataram atau besar populasi (N) sebanyak 3 Kecamatan yang terdiri dari 50 Kelurahan.

Lokasi sampel (sampel area) ditetapkan secara sengaja (purposive), yakni sebanyak 30 lokasi/kelurahan dari 50 lokasi/kelurahan yang ada. Adapun ukuran atau besar sampel ditarik secara random sampling sebesar 60 % dari besar populasi, sehingga sampel responden diperoleh sebanyak 30 Kelurahan yang telah mendapatkan dan melaksanakan pembangunan partisipatif dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

4.5. Teknik Analisis Data

Untuk keperluan pengujian hipotesis, maka teknik analisis data yang relevan digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menguji hipotesis 1 – 4 tentang pengaruh variabel-variabel bebas (pemberian pelatihan/keterampilan, pemberian bantuan modal, cara-cara pengolahan usaha dan pendapatan/profit usaha) secara parsial atau terpisah/sendiri-sendiri terhadap variabel tak bebas (Pemberdayaan Masyarakat), digunakan teknik analisis regresi sederhana (regresi parsial) dengan menyelesaikan persamaan : $\hat{Y} = a + bX$ (Sudjana, 1983).

Selanjutnya, untuk menaksir besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tak bebas, digunakan harga koefisien determinasi (r^2) dari hasil analisis korelasi sederhana (korelasi *product moment*) dengan prosedur analisis sebagai berikut :

1. Menghitung koefisien korelasi digunakan rumus *r-Pearson* yang dimodifikasi oleh Sudjana (1983), sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

- 2) Untuk mengetahui derajat determinasi (daya penentu) atau besarnya pengaruh dari variabel-variabel bebas secara terpisah terhadap variabel tak bebas, diperoleh dengan cara mengkwadratkan harga/nilai koefisien korelasi, yaitu (r^2).

Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagai suatu Strategi(Syaumudinsyah)

- 3) Untuk uji signifikansi hubungan antara variabel, maka nilai r-hitung langsung dikonsultasikan dengan nilai r-tabel pada taraf uji 1 % dengan $dk = n$.
- b. Untuk menguji hipotesis 5, tentang pengaruh variabel-variabel bebas secara besama-sama (simultan) terhadap variabel terikat (variabel tak bebas), digunakan teknik analisis regresi berganda; dengan prosedur analisis sebagai berikut :

- 1) Mencari persamaan regresi ganda, dengan rumus :

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

di mana :

- $\hat{Y} = Y$ prediksi (Y duga)
- $a =$ harga Y bila $X = 0$ (harga konstan)
- $b_j = 1,2,3,4$ ialah koefisien-koefisien regresi; dan $X (1,2,3,4)$ adalah harga-harga variabel-variabel bebas 1,2,3,4 yang disubstitusikan ke dalam persamaan regresi di atas dengan menggunakan metode interpolasi dalam rangka memprediksi nilai variabel Y (Sudjana, 1983).

Selanjutnya, nilai koefisien a dan $b_j (b_1;b_2;b_3; b_4)$ ditaksir dari data sampel dengan menggunakan metode kuadrat terkecil melalui program "minitab for windows".

- 2) Uji keberartian regresi ganda digunakan statistik F, melalui rumus :

$$F = \frac{JK(\text{Reg})/k}{JK(S)/(n-k-1)}$$

- 3) Selanjutnya, untuk mengetahui besarnya pengaruh variable - variabel bebas ($X_1 - X_4$) secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat (variabel tak bebas) digunakan analisis detrmniasi ganda dengan menyelesaikan persamaan :

$$R_{y.123}^2 = \frac{JK(\text{reg})}{\sum y^2}$$

Untuk uji signifikansi koefisien korelasi ganda digunakan rumus :

$$F = \frac{R/k}{(1-R)/(n-k-1)}$$

- c. Aturan Penerimaan Hipotesis : Hipotesis dapat diterima, apabila hasil uji menunjukkan signifikan pada taraf signifikansi 1 % ($\alpha: 0,01$)

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Kota Mataram

Kota Mataram terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1993 yang secara geografis terletak pada ujung sebelah barat pulau Lombok, terletak pada posisi $116^04' - 116^010'$ Bujur Timur, dan $08^033' - 08^038'$ Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Sari dan Desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Desa Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

Bagian Barat : Selat Lombok

Kota Mataram selain merupakan Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat juga merupakan Pusat Pemerintahan, Pusat Pendidikan dan Pusat Perekonomian Barang dan Jasa dengan pintu masuk sebelah barat yaitu Bandara Selaparang, sebelah Selatan

Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagai suatu Strategi(Syaumudinsyah)

Pelabuhan Lembar yang datang dari Padang Bai (Bali) dan sebelah Timur Pelabuhan Kayangan Labuan Lombok yang datang dari pulau Sumbawa.

Kota Mataram secara administratif memiliki luas wilayah 61,30 km², terbagi dalam 3 wilayah Kecamatan, 50 Kelurahan 27 diantaranya adalah Kelurahan hasil pemekaran, 279 lingkungan, 284 RW dan 1.350 RT berpenduduk 342.020 jiwa.

Kondisi Topografi Kota Mataram umumnya datar dengan tingkat kemiringan antara 0 – 8% (Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Mataram) Bagian Barat. Di bagian Timur (Kecamatan Cakranegara) agak tinggi dan relief tidak datar dengan tingkat kemiringan antara 10 – 15 %.

Ketinggian tanah bervariasi yaitu Kecamatan Cakranegara mencapai 25 m, Kecamatan Mataram 15 m dan Kecamatan Ampenan 5 m dari permukaan laut dan termasuk daerah pantai.

Kota Mataram umumnya merupakan daerah yang beriklim tropis, musim hujan antara bulan Oktober sampai dengan April dan sebaliknya adalah musim kemarau, dengan curah hujan 1.256,6 mm/tahun, dan jumlah hari hujan relative yaitu 110 hari/hujan. Suhu udara rata-rata mencapai 26^oC dengan kelembaban udara rata-rata mencapai 80%/tahun.

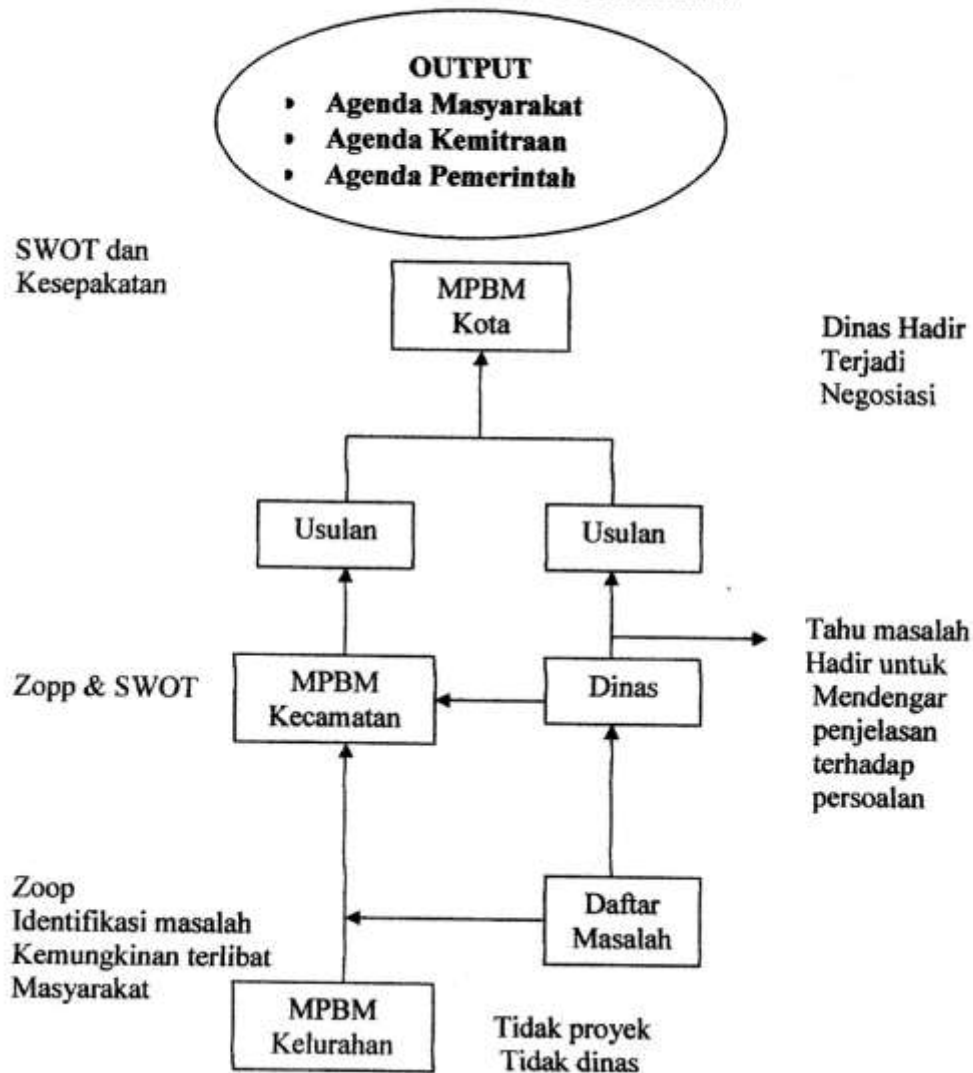
5.2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Kota Mataram

Sebagai penanggung jawab pemerintahan dan pembangunan di Kota Mataram, maka masalah yang paling mendasar dan merupakan aspirasi dari sebagian masyarakat Kota Mataram yang melatar belakangi kebijakan Wali Kota Mataram untuk Membangun Kota Bermitra Masyarakat melalui Visi dan Misi Kota Mataram, IBADAH yang maju dan Religius.

Gagasan dan tekad untuk meningkatkan kemajuan memberdayakan Sumber Daya dan potensi yang ada serta kesejahteraan masyarakat Kota Mataram, nampak menjadi prioritas kebijakan yang ditempuh Wali Kota termasuk diantaranya dengan melibatkan langsung masyarakat yang berkompeten dalam proses Perencanaan Pembangunan Kota Mataram melalui kegiatan “Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat” (MPBM). Di mana dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh UMA BUILD.

Mekanisme perencanaan MPBM di Kota Mataram seperti pada Gambar 3. berikut :

Gambar 3. Mekanisme MPBM Perencanaan Kota Mataram



5.3. Penerapan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Penerapan perencanaan pembangunan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat di Kota Mataram adalah :

1. Tujuan

Secara umum tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah :

- a) Penanggulangan kemiskinan
- b) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan masyarakat
- c) Pengembangan dan penguatan kapasitas individual dan institusi masyarakat
- d) Pengembangan ekonomi local
- e) Peningkatan kapasitas kelembagaan di daerah

2. Prinsip dasar

Beberapa prinsip dasar yang digunakan adalah :

- a) Good governance, yaitu keterbukaan, partisipasi, demokrasi dan akuntabilitas
- b) Desentralisasi dan otonomi daerah
- c) Nilai-nilai universal, yaitu kepercayaan, kerelaan, jujur, adil, kesetaraan

Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebagai suatu Strategi(Syaumudinsyah)

- d) Pembangunan berkelanjutan : sosial, ekonomi
- e) Masyarakat sebagai pelaku pembangunan
- f) Perencanaan partisipatif

3. **Targeting**

- a) Umumnya untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi
- b) Sebagian dilaksanakan ditingkat desa, kecamatan, dan/atau kabupaten
- c) Penerima manfaat adalah rumah tangga/kelompok masyarakat miskin

4. **Strategi pelaksanaan**

- a) Pembentukan kelompok masyarakat
- b) Melibatkan fasilitator sebagai pendamping kelompok masyarakat
- c) Ada konsultan ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat
- d) Membentuk forum-forum diskusi, pengajuan usulan/prioritas, penentuan kriteria kemiskinan di tingkat desa dan kecamatan serta fasilitasnya
- e) Melibatakan pemerintah daerah setempat khususnya kabupaten/kota

5. **Titik berat kegiatan**

- a) Pelaksanaan siklus kegiatan meliputi sosialisasi, pembentukan kelompok, pelaksanaan, monitoring dan pemantauan
- b) Penyediaan

6. **Out put**

- a) Out come

5.4. Hasil Analisis Statistik

1. Korelasi Product Moment

Teknik analisis korelasi *product moment* (korelasi sederhana) digunakan untuk menguji keeratan hubungan sekaligus menghitung besarnya pengaruh/kontribusi (daya penentu) dari masing-masing variabel bebas (X1 - X4) secara terpisah/sendiri-sendiri terhadap variabel terikat (Y).

- a. Koefisien korelasi : Setelah dilakukan perhitungan/analisis dengan menerapkan formula r-pearson yang telah dimodifikasi oleh Sudjana, (lihat lampiran 4) diperoleh hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel 11, berikut ini.

Tabel 11. Koefisien Korelasi Product Moment (r)

Variabel	r
X1Y	0,9128
X2Y	0,9622
X3Y	0,9517
X4Y	0,7425

Sumber : Matriks korelasi product moment (lampiran 4).

- b. Koefisien determinasi : Untuk mengetahui besarnya pengaruh/kontribusi variabel bebas secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikat/tak bebas, maka harga-harga koefisien korelasi (lihat tabel 11) dikwadratkan (r^2) yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Koefisien Determinasi (r^2)

Variabel	r	(r^2)	persen
X1Y	0,9128	0,8332	83,32
X2Y	0,9622	0,9258	92,58
X3Y	0,9517	0,9058	90,58
X4Y	0,7425	0,5513	55,13

- c. Uji Signifikansi : Untuk mengetahui tingkat signifikansi atau keberartian hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat, maka harga-harga koefisien korelasi (r) antara variabel X1-X4 dengan Y langsung dikonsultasikan dengan nilai r-tabel pada taraf uji 1 % dengan $dk = n$ sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 13. Hasil Uji Signifikansi Hubungan

Variabel	r hitung	(r)Tabel	Signifikan
X1Y	0,9128	0,296	1 %
X2Y	0,9622	0,296	1 %
X3Y	0,9517	0,296	1 %
X4Y	0,7425	0,296	1 %

Setelah dilakukan uji signifikansi (lihat Tabel 13) yakni dengan mengkonsultasikan harga r-hitung dengan harga r-tabel (harga kritik *r-Pearson*) diperoleh hasil-hasil sebagai berikut :

- 1) Koefisien korelasi antara variabel Model manusia (X1) dengan variabel Hasil pemberdayaan (Y) diperoleh sebesar 0,9128. Setelah dikonsultasikan dengan harga r-tabel, ternyata hubungan antara kedua variabel sangat signifikan pada taraf signifikasni 1%, di mana $r \text{ hitung} = 0,9128 > r_{\text{tabel}} = 0,296$. Hasil ini membuktikan bahwa faktor model manusia (human capital) berperan dalam perencanaan pembangunan partisipatif, telah teruji keberlakuannya dengan sangat meyakinkan.
 - 2) Koefisien korelasi antara variabel Modal sosial (Social Capital) (X2) dengan variabel Hasil Pemberdayaan (Y) diperoleh sebesar 0,9622. Setelah dikonsultasikan dengan harga r-tabel, ternyata hubungan antara kedua variabel sangat signifikan pada taraf signifikansi 1 % ($r \text{ hitung} = 0,9622 > r_{\text{tabel}} = 0,296$). Hasil ini menunjukkan bahwa Modal sosial (Social Capital) juga berperan sehingga dapat diterima keberlakuannya dengan sangat meyakinkan.
 - 3) Koefisien korelasi antara variabel Persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan (X3) dengan variabel Hasil pemberdayaan (Y) diperoleh sebesar 0,9517. Setelah dikonsultasikan dengan harga r-tabel, ternyata hubungan antara kedua variabel sangat signifikan pada taraf signifikansi 1 %, karena $r_{\text{hitung}} = 0,9517 > r_{\text{tabel}} = 0,296$. Dengan demikian hasil ini mengindikasikan bahwa Persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan dapat diterima keberlakuannya pada taraf signifikansi 1 %.
 - 4) Koefisien korelasi antara variabel Persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan (X4) dengan variabel Hasil pemberdayaan (Y) diperoleh sebesar 0,7425. Setelah dikonsultasikan dengan harga r-tabel, ternyata hubungan antara kedua variabel sangat signifikan pada taraf signifikansi 1 %, karena $r_{\text{hitung}} = 0,7425 > r_{\text{tabel}} = 0,296$. Dengan demikian hasil ini mengindikasikan bahwa Persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan dapat diterima keberlakuannya pada taraf signifikansi 1 %.
2. Regresi Parsial Analisis regresi sederhana atau regresi parsial digunakan untuk menguji hipotesis 1 – 4, yakni tentang pengaruh variabel-variabel bebas (*prediktor*) secara sendiri-sendiri atau terpisah terhadap variabel terikat/tak bebas (*respons*). Dengan mengoperasikan program *Minithab for windows* diperoleh hasil-hasil sebagai berikut :

Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Parsial Empat Prediktor Dan Uji Signifikansi

Variabel	Koefisien		Signifikansi	
	a	b	t	F
X1 → Y	-8622.3	9154.35	18.697	349.56
X2 → Y	13550.76	31.70	29.558	873.66
X3 → Y	-46619.4	5790.17	25.938	672.76
X4 → Y	4979.8	55.21	9.273	85.99

Sumber : Analisis data (lampiran 4)

Hasil analisis regresi parsial sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel 14 memperlihatkan kecenderungan bahwa semua variabel bebas berpengaruh sangat nyata atau signifikan terhadap variabel tak bebas. Untuk itu perlu dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Analisis pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y : Hasil analisis regresi parsial tentang peranan model manusia (human capital) (X1) terhadap Hasil pemberdayaan (Y) diperoleh persamaan $\hat{Y} = -8622,3 + 9154,35 X1$. Hasil ini menunjukkan bahwa model manusia (human capital) berpengaruh positif terhadap hasil pemberdayaan masyarakat. Artinya bahwa apabila tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, tingkat keeratan hubungan antar sesame akan menyebabkan terjadinya perubahan atau peningkatan hasil pemberdayaan. Setelah dilakukan uji signifikansi koefisien regresi dengan menggunakan statistik-t dan uji model regresi dengan menerapkan analisis varians atau uji-F, maka diperoleh hasil untuk uji keberartian koefisien regresi (uji-t) menunjukkan bahwa koefisien regresi-b sebesar 9154,35, ternyata sangat nyata pada taraf signifikansi 1%, karena nilai t hitung jauh lebih besar dari nilai t tabel ($18,697 > 2,660$). Demikian halnya dengan uji model regresi, di mana harga F hitung jauh lebih besar dari harga Ftabel ($349,56 > 7,01$). Dengan demikian, hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa model manusia (human capital) secara meyakinkan dapat diterima keberlakuannya pada taraf signifikansi 1%, sekaligus mengindikasikan bahwa hubungan fungsional variabel model manusia (human capital) dengan hasil pemberdayaan berpola linier positif.
- b. Analisis pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y : Hasil analisis regresi parsial tentang model sosial (sosial capital) (X2) terhadap hasil pemberdayaan (Y) diperoleh persamaan $\hat{Y} = -13550,76 + 31,70 X2$. Hasil ini menunjukkan bahwa model sosial (sosial capital) berpengaruh positif terhadap hasil pemberdayaan. Artinya bahwa apabila terjadi perubahan atau peningkatan pemberian kerjasama, kepercayaan antar sesame, kepatuhan terhadap norma, kepedulian antar sesame, keterlibatan dalam akitifitas organisasi sosial akan menyebabkan terjadinya perubahan atau peningkatan hasil pemberdayaan . Setelah dilakukan uji signifikansi koefisien regresi dengan menggunakan statistik-t dan uji model regresi dengan menerapkan analisis varians atau uji-F, diperoleh hasil untuk uji keberartian koefisien regresi (uji-t) menunjukkan bahwa koefisien regresi-b sebesar 31,70, ternyata sangat nyata pada taraf signifikansi 1%, karena nilai t hitung jauh lebih besar dari nilai t tabel ($29,558 > 2,660$). Demikian pula dengan uji model regresi, di mana harga F hitung jauh lebih besar dari harga F tabel ($873,66 > 7,01$). Dengan demikian, hasil uji signifikansi

menunjukkan bahwa model sosial (social capital) secara meyakinkan dapat diterima keberlakuannya pada taraf signifikansi 1%, sekaligus mengindikasikan bahwa hubungan fungsional variabel model sosial (capital model) dengan hasil pemberdayaan berpola linier positif. Artinya bahwa apabila model sosial (social human) ditingkatkan, maka hasil pemberdayaan dari sisi peningkatan kesejahteraan akan turut mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya.

- c. Analisis pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y : Berdasarkan hasil analisis regresi parsial (regresi sederhana) tentang pengaruh persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan (X3) terhadap hasil pemberdayaan (Y) diperoleh persamaan $\hat{Y} = -46619,4 + 5790,17 X3$. Persamaan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan berperan positif terhadap hasil pemberdayaan. Artinya bahwa apabila terjadi perubahan atau peningkatan persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan dengan baik, akan menyebabkan terjadinya perubahan atau peningkatan hasil pemberdayaan.

Setelah dilakukan uji signifikansi koefisien regresi dengan menggunakan statistik-t dan uji model regresi dengan menerapkan analisis varians atau uji-F, diperoleh hasil untuk uji keberartian koefisien regresi (uji-t) menunjukkan bahwa koefisien regresi-b sebesar 5790,17, ternyata sangat nyata berarti pada taraf signifikansi 1%, karena nilai t hitung jauh lebih besar dari nilai ttabel ($25,938 > 2,660$). Demikian pula dengan uji model regresi, di mana harga F hitung jauh lebih besar dari harga F tabel ($672,76 > 7,01$). Dengan demikian, hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan secara meyakinkan dapat diterima keberlakuannya pada taraf signifikansi 1%, sekaligus mengindikasikan bahwa hubungan fungsional persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan dengan hasil pemberdayaan berpola linier positif. Hal ini berarti bahwa apabila persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan baik, maka hasil pemberdayaan akan turut mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya.

- d. Analisis pengaruh variabel X4 terhadap variabel Y : Hasil analisis regresi parsial tentang persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan (X4) terhadap hasil pemberdayaan (Y) diperoleh persamaan $\hat{Y} = 4979,8 + 55,21 X4$. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan berpengaruh positif terhadap hasil pemberdayaan. Artinya bahwa apabila terjadi perubahan atau peningkatan persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan atau peningkatan hasil pemberdayaan.

Setelah dilakukan uji signifikansi koefisien regresi dengan menggunakan statistik-t dan uji model regresi dengan menerapkan analisis varians atau uji-F, diperoleh hasil untuk uji keberartian koefisien regresi (uji-t) menunjukkan bahwa koefisien regresi-b sebesar 55,21, ternyata sangat nyata atau berarti pada taraf signifikansi 1%, karena nilai t hitung jauh lebih besar dari nilai ttabel ($9,273 > 2,660$). Demikian halnya dengan uji model regresi, di mana harga F hitung jauh lebih besar dari harga Ftabel ($85,99 > 7,01$). Dengan demikian, hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan secara meyakinkan dapat diterima keberlakuannya pada taraf signifikansi 1%, sekaligus mengindikasikan bahwa hubungan fungsional persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan dengan hasil pemberdayaan berpola linier positif. Artinya bahwa apabila persepsi masyarakat

terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan, maka hasil pemberdayaan akan turut mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya.

3. **Regresi Berganda** Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pola hubungan fungsional antara variabel-variabel Bebas (X1 – X4) secara bersama-sama (simultan) dengan variabel Tak Bebas (Y) sekaligus untuk menguji hipotesis 5, yang berbunyi “Secara model manusia (human capital), model sosial (sosial capital), persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan, dan persepsi masyarakat terhadap pelaku pemberdayaan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pembangunan partisipatif sebagai strategi pemberdayaan masyarakat di Kota Mataram”..

Berdasarkan perhitungan regresi ganda, diperoleh persamaan prediksi : $\hat{Y} = -27223.664 + 2161,401 X_1 + 17,594 X_2 + 1532,740 X_3 + 0.746 X_4$; dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9578. Untuk mengetahui arti persamaan regresi ganda, agar dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tentang pengaruh variabel-variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel tergantung (hasil pemberdayaan), maka dilakukan uji model regresi melalui uji keragaman (analisis varians) dan uji keberartian koefisien regresi ganda melalui uji statistik ‘t’, disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14.

Tabel. 15. Hasil analisis keragaman X1 – X4 Untuk Uji Model regresi Ganda

$$\hat{Y} = -27223.664 + 2161,401 X_1 + 17,594 X_2 + 1532,740 X_3 + 0,746 X_4$$

Sumber Variasi	Sun of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	71258834758.69	4	17814708689.67	380.36	0.000
Residual (Error)	3138040241.31	67	46836421		
Total	74396875000.00	71			

Sumber : Lampiran 4

Dari hasil uji keragaman regresi berganda, diperoleh $F_{hitung} = 380,36$, ternyata jauh lebih besar bila dibanding dengan F_{tabel} pada taraf nyata $0,01 = 7,01$. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semua variabel bebas (model manusia, model sosial, persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan, persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan) merupakan satu kesatuan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap hasil pembangunan partisipatif Kota Mataram. Dengan demikian, model manusia, model sosial, persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan, persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan dapat diterima keberlakuannya pada taraf signifikansi 1 %.

Untuk mengetahui keberartian masing-masing koefisien regresi b_1, b_2, b_3, b_4 dan konstanta a , digunakan statistik ‘t’ sebagaimana dapat disimak melalui Tabel 16 berikut ini.

Tabel 16. Hasil Uji Keberartian Koefisien Regresi Ganda

Predictor	Coef	St. dev	t-ratio	t-Tabel (0,01)
Constant	-27223.664	4022.6433	-6.7676	
X1	2161.401	605.1580	3.5716	
X2	17.594	2.3063	7.6284	2,66
X3	1532.740	515.86.06	2.9712	
X4	0.746	2.8870	0.2584	

Hasil uji statistik “t” pada tabel 16 di atas menunjukkan bahwa ternyata semua koefisien regresi sangat signifikan pada taraf signifikansi 1 %, kecuali koefisien b4, dimana harga t hitung dari koefisien b1 – b3 dari variabel X1 – X3 jauh lebih besar dari harga t tabel pada taraf signifikansi 1 %. Adapun besarnya pengaruh semua variabel bebas (X1 – X4) terhadap variabel tergantung (Y) dapat dilihat dari koefisien determinasi yang diperoleh, yaitu sebesar 0,9578. Ini menunjukkan bahwa 95,78 persen variasi meningkatnya hasil pemberdayaan ditentukan atau dipengaruhi oleh variasi variabel-variabel bebas (model manusia, model sosial, persepsi masyarakat terhadap proses pembangunan, persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pembangunan) dalam satu kesatuan secara bersama-sama (bersinergi), sedangkan sisanya sebesar 4,22 persen ditentukan oleh faktor-faktor lainnya. Selain itu, ketepatan prediksinya dapat dijamin, karena sesuai hasil uji menunjukkan bahwa *standard deviasi* (simpangan baku) variabel tergantung (sy) sebesar 32370,41 jauh lebih besar dari *standard error estimasi* (SEEst) sebesar 6843,71. Hasil ini memberi makna bahwa berhasil tidaknya perencanaan pembangunan partisipatif sebagai strategi pemberdayaan masyarakat di Kota Mataram karena pengaruh semua variabel bebas (model manusia, model sosial, persepsi masyarakat terhadap proses pembangunan, persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pembangunan) dapat diprediksi dengan tepat melalui persamaan regresi ganda di atas.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa peranan model manusia (human capital) dalam perencanaan pembangunan partisipatif sebagai strategi pemberdayaan masyarakat mencapai ± 51,51 %.

Dari hasil analisis regresi partial telah teruji model manusia (human capital berperan positif dan signifikan terhadap hasil pemberdayaan Kota Mataram”. Koefisien korelasi sebesar 0,9128 dan koefisien determinasi sebesar 0,8332 dapat diinterpretasikan bahwa di satu sisi, kuatnya keterkaitan atau derajat korelasi antara model manusia (human capital) dengan hasil pemberdayaan sebesar 91,28 %, sementara di sisi yang lain, besarnya kontribusi model sosial (social capital) terhadap hasil pemberdayaan sebesar 83,32%, sedangkan sisanya sebesar 16,68 % turut ditentukan oleh faktor lain.

Berdasarkan hasil analisis regresi partial telah teruji model sosial (social human), yang menyatakan bahwa “model sosial (social human) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pemberdayaan Kota Mataram”. Koefisien korelasi sebesar 0,9622 dan koefisien determinasi sebesar 0,9258 bermakna bahwa di satu sisi, kuatnya keterkaitan atau derajat korelasi antara model sosial (social capital) dengan hasil pemberdayaan sebesar 96,22%, sementara di sisi yang lain, besarnya kontribusi model sosial (social model) terhadap hasil pemberdayaan sebesar 92,58%.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa hasil pemberdayaan oleh pemerintah kota Mataram dari sisi keberhasilan pembangunan partisipatif sebagian besar (92,58%)

turut ditentukan atau dipengaruhi oleh model sosial (social capital) yaitu kerjasama, kepercayaan antar sesama, kepatuhan terhadap norma, kepedulian antar sesama, keterlibatan dalam aktivitas organisasi sosial. sementara sisanya sebesar 7,42 % turut ditentukan oleh faktor lain.

Hasil analisis data (analisis regresi partial) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan, yang berbunyi “persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil pemberdayaan Kota Mataram”, dapat diterima atau teruji keberlakuannya dengan sangat meyakinkan. Harga koefisien korelasi sebesar 0,9517 dan koefisien determinasi sebesar 0,9058 bermakna bahwa keeratan hubungan atau keterkaitan antara persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan dengan hasil pemberdayaan terkategori “sangat kuat”, sementara kontribusi persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan terhadap hasil pemberdayaan diperoleh sebesar 90,58 %.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hasil pemberdayaan oleh pemerintah kota Mataram, sebagian besar (90,58%) turut ditentukan atau dipengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan, sementara sisanya sebesar 9,42% turut ditentukan oleh faktor lain.

Hasil analisis regresi partial menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan, yang menyatakan bahwa “persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap hasil pemberdayaan di Kota Mataram”, dapat diterima dengan sangat meyakinkan, dimana koefisien korelasi sebesar 0,7425 dan koefisien determinasi sebesar 0,5513 memberi makna bahwa di satu sisi, kedua variabel mempunyai hubungan-keterkaitan atau keeratan hubungan yang cukup kuat, dan disisi lain, hasil pemberdayaan masyarakat, lebih dari setengahnya (55,13 %) turut ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan. Artinya bahwa apabila persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan baik, maka diharapkan akan berpengaruh positif terhadap hasil pemberdayaan itu sendiri.

Mengacu pada hasil analisis regresi berganda, maka dapat dikatakan bahwa hasil pemberdayaan, yang menyatakan “Secara simultan (model manusia (human capital), model sosial (social capital), persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan, persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan)”, dapat diterima keberlakuannya dengan sangat meyakinkan. Hal ini ditandai dengan hasil uji signifikansi, dimana F hitung jauh lebih besar dari F tabel pada taraf signifikansi 1 persen.

Sementara itu, diketahui bahwa koefisien korelasi ganda sebesar 0,9787 dan koefisien determinasi sebesar 0,9578 memberi makna bahwa kuatnya hubungan secara bersama-sama (simultan) variabel-variabel bebas (model manusia (human capital), model sosial (social capital), persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan, persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan) dengan hasil pemberdayaan kota mataram berada pada kategori “sangat kuat atau tinggi”, sementara kontribusi variabel-variabel bebas (model manusia (human capital), model sosial (social capital), persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan, persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan) terhadap hasil pemberdayaan diperoleh sebesar 95,78%. Artinya bahwa hasil pemberdayaan, sebagian besar (95,78 %) dipengaruhi secara simultan oleh faktor-faktor (model manusia (human capital), model sosial (social capital), persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan, persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan) yang merupakan aspek-aspek

pemberdayaan itu sendiri, sedangkan sisanya sebesar 4,23 % ditentukan oleh faktor-faktor lainnya.

Realitas ini dapat dibenarkan, karena secara teoritis, konsep pemberdayaan itu sendiri mengandung makna “membuat” (seseorang) berdaya. Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan pada intinya adalah manusia, dalam arti mendorong orang untuk menampilkan dan merasakan hak-hak azasnya. Di dalam pemberdayaan terkandung unsur pengakuan dan penguatan posisi seseorang, melalui penegasan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki dalam seluruh tantangan kehidupan. Di dalam proses pemberdayaan diusahakan agar orang berani menyuarakan dan memperjuangkan ketidak seimbangan hak dan kewajiban. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan (Mulandar dan Thamrin, 1996 : 97). Pendapat ini berimplikasi bahwa masyarakat khususnya di kota Mataram sebagai manusia memiliki hak-hak yang perlu dikembangkan, seperti berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperolehnya melalui hak untuk memperoleh pekerjaan dan untuk menjalankan pekerjaannya secara baik, hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil dan pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

6.1. Kesimpulan

- a) Perencanaan pembangunan partisipatif sebagai strategi pemberdayaan masyarakat di Kota Mataram berdampak positif untuk memberikan perubahan pola pikir serta kapasitas masyarakat, di mana dalam prosesnya faktor-faktor yang berperan dalam mendukung keberhasilan perencanaan pembangunan partisipatif adalah semua komponen masyarakat, aparat pemerintah dan kelembagaan dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pemeliharaan hasil kegiatan, dengan tingkat prosentase 89,5 %,
- b) Faktor model manusia (*human capital*), model sosial, (*social capital*), persepsi masyarakat terhadap proses pemberdayaan, dan persepsi masyarakat terhadap kemampuan pelaku pemberdayaan, secara parsial memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap hasil perencanaan pembangunan partisipatif sebagai strategi pemberdayaan masyarakat di Kota Mataram.
- c) Keempat faktor tersebut juga secara simultan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap hasil pemberdayaan masyarakat. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Mataram berperan positif dalam meningkatkan dan mendukung pembangunan oleh pemerintah kota Mataram.

6.2. Saran-Saran

Mengacu pada beberapa temuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

- a) Mengingat “label” pemberdayaan masyarakat digunakan oleh banyak program/proyek, perlu ada kebijakan sebagai payung agar tidak membingungkan pelaksanaannya di masyarakat, untuk komponen pendampingan dan konsultan perlu dibedakan antara kebutuhan akan konsultan ditingkat pusat dan daerah, mengingat pengadaan pendampingan dan konsultan di daerah akan membuka kesempatan kerja bagi sarjana lokal/setempat, serta perlu dibuat pemetaan lokasi program/proyek pemberdayaan agar tidak tumpang tindih dan untuk pemerataan kegiatan di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Hikmat, H. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora: Bandung.
- Ife, J.W. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*: Longman. Australia.
- Jamasy, O. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan, & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta Selatan: Blantika.
- Kartasasmita, G. 1996. *Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenal Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Paul, S. 1987. *Community Participation in development Project. The World Bank Experience*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Payne, M. 1997. *Social Work and Community Care*. London: McMillan.
- Priyono, O.S. & A.M.W. Pranarka, 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Pranaka dan Vidhyandika. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment)*. Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS).
- Rappaport. 1987. "Terms of Empowerment: Toward a theory for Community Psychology". *American Journal of Community Psychology*. Vol. 15. No.2: 15-16
- Robinson, J.R. 1994. *Community Development in Perspective*. Ames: Iowa State University Press
- Simon, H. 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran. Problematika dan Strategi Pemecahannya*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.
- Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sumardjo. 1999. "Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani: Kasus di Propinsi Jawa Barat". Disertasi Doktor. Bogor: Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Sanusi Bachrawi, 2000, *Pengantar Perencanaan pembangunan*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sinambela Lijan P., 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Suhendra K., 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung, Alfabeta
- Sumodiningrat, G. 2000. *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*. Yogyakarta: IDEA.
- Suisyanto, 2006, *Manual Kerja Perubahan Sosial*, Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, CV. Alfabeta
- Tjokrowinoto, M. 2001. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tjokroamidjojo Bintoro, 1999, *Perencanaan pembangunan*, Jakarta, PT. Gunung Agung
- Wrihantnolo Randy R. & Dwidjowijoto Riant Nograho, 2007, *Manajemen Pemberdayaan Sebuah pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, PT. Elex media Komputindo